

**Judul** : Kekerasan guru akibat lemahnya sosialisasi regulasi  
**Tanggal** : Senin, 04 September 2023  
**Surat Kabar** : Media Indonesia  
**Halaman** : 2

# Kekerasan Guru akibat Lemahnya Sosialisasi Regulasi

KASUS kekerasan dari tenaga pendidik kepada siswa yang kembali terjadi menunjukkan adanya kelemahan dari sisi regulasi dari Kemendikbud-Ristek. Meskipun tertapat Permendikbud-Ristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan, regulasi ini dikatakan hanya di atas kertas.

"Di sekolah masih belum ada perubahan apa-apa. Sebelumnya juga sudah ada Permendikbud 82/2015 toh kekerasan di sekolah masih merajalela. Intinya mengandalkan regulasi saja itu sama dengan mengulang kesalahan masa lalu," ujar Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPPI) Ubaid Matraji ketika dihubungi, kemarin.

Kasus kekerasan di sekolah ini menjadi

perbincangan hangat setelah seorang guru di SMP Negeri Sidodadi Lamongan, Jawa Timur, membotaki 19 siswi lantaran berjilbab tanpa dalam kerudung.

Ubaid menambahkan, saat ini Indonesia memiliki permasalahan sosialisasi. Dalam artian, kebijakan ini harus sampai ke sekolah dan dijalankan dengan baik. Tidak hanya itu, permasalahan lain juga terdapat dari sisi pola pikir dari tenaga pendidik yang masih bermasalah.

"Kita bisa bayangkan bagaimana parahnya *mindset* guru-guru kita, misalnya soal cara berpakaian. Itu tidak hanya terjadi di sekolah negeri, tapi juga sekolah swasta yang berbasis agama. Bisa jadi mereka punya *mindset* yang sangat eksklusif dan intoleran. Ini berbaha-

ya," ujar Ubaid.

Saat dihubungi terpisah, sosiolog Universitas Indonesia (UI) Rissalwan Habyd Lubis mengatakan bahwa aspek regulasi bidang pendidikan belum mampu menjangkau secara maksimal dan efektif kepada unit layanan pendidikan di daerah.

"Hal ini sama saja dengan kisruhnya penerimaan siswa baru belum lama ini. Regulasi dari tingkat pusat seolah-olah tidak dijadikan referensi dalam praktik pendidikan di tingkat sekolah. Mungkin karena kurangnya sosialisasi atau mungkin ada faktor pemahaman atau kepentingan setiap sekolah," ujar Rissalwan.

Direktur Eksekutif Maarif Institute Abd Rohim Ghazali mengatakan peristiwa ini harus menjadi perhatian serius bagi semua pihak,

terutama bagi *stakeholder* di sektor pendidikan.

"Terutama Mas Menteri Nadiem Makarim yang getol mengampanyekan Merdeka Belajar. Ini sangat bertolak belakang dengan prinsip-prinsip merdeka belajar," katanya.

Program Manager HAM dan Demokrasi INFID Abdul Waidl mengatakan kasus yang dialami 19 siswi di Lamongan itu akibat peraturan daerah (perda) yang terindikasi menjadi jembatan awal terjadinya kasus diskriminasi dan intoleransi berbasis agama.

"Penggunaan jilbab atau apa pun itu yang merupakan atribut keagamaan merupakan urusan setiap individu. Ketika dipaksakan dalam ruang dan lembaga publik, ini merupakan kekerasan dan menjadi persoalan bersama," tegasnya. (Des/Dis/X-5)